



Peran *International Justice Missions* (IJM) dalam Menangani Kasus *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC) di Filipina pada Tahun 2010-2019

Anak Agung Ayu Krisna Devi¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *International Justice Missions* (IJM) dalam menangani kasus *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC) yang terjadi di Filipina dari tahun 2010 sampai tahun 2019 menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual *Cybercrime* dalam melihat fenomena OSEC sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan teknologi jaringan dan konsep *Civil Society Organizations* (CSOs) untuk menganalisis peran IJM yaitu *Rescuing and Restoring Victims*, *Bring Criminals to Justice*, dan *Strengthening Justice Missions* melalui peran CSOs yaitu *educator* dengan mengedukasi korban, masyarakat, dan aparat hukum Filipina, *counterpart* dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat hukum Filipina, dan *agenda setter* dengan menjadikan kasus OSEC sebagai agenda penting di Filipina. Peran IJM di Filipina dilakukan sebagai upayanya membantu meningkatkan kapasitas pemerintah Filipina dalam menangani kasus OSEC melalui tiga program yang dijalankan di tiga wilayah di Filipina. Penelitian ini menganalisis peran IJM sebagai bagian dari *Civil Society* dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan NGO lokal Filipina dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi kasus OSEC yang membantu pemerintah Filipina dalam menurunkan angka kasus OSEC di negaranya.

Kata-kunci : CSOs, *Cybercrime*, Filipina, IJM, OSEC

Abstract

This study aims to analyse the role of International Justice Missions (IJM) in handling Online Sexual Exploitation of Children (OSEC) in the Philippines during the period 2010 to 2019 using qualitative-descriptive as research methods. Two concepts are used in this study, Cybercrime to identify OSEC as a crime involving computers and networks, and Civil Society Organizations (CSOs) to analyse IJM's role by Rescuing and Restoring Victims, Bring Criminals to Justice, and Strengthening Justice Missions by being part of CSOs as an educator in educating the victims, the people, and the law enforcement of Philippines, a counterpart by collaborating with the government and the law enforcement, and an agenda setter by setting OSEC case as an important and crucial agenda for the government. IJM's work in the Philippines is to help improving the Philippines' Government and law enforcement in handling OSEC cases by conducting three programs in three

areas. This study analysed the role of IJM as part of civil society by collaborating with the government and local NGOs in identifying and investigating OSEC cases to help in reducing the cases in the Philippines.

Keywords: CSOs, Cybercrime, IJM, OSEC, Philippines

Kontak Penulis

Anak Agung Ayu Krisna Devi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Udayana

Denpasar, 80223

Telp: 087858424536

E-mail : aaakrisdev1405@gmail.com

PENDAHULUAN

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan baru yang didefinisikan sebagai aksi kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti komputer, jaringan internet, dan teknologi komunikasi lainnya (UNODC, 2019). *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) membahas tipe umum *Cybercrime* yang didefinisikan melalui perspektif sains, legal dan kriminologi, dan politik (UNODC, 2019). Dalam penelitian ini, definisi *cybercrime* dilihat melalui perspektif legal dan kriminologi dengan melihat jenis kejahatan yang dilakukan. Menurut perspektif ini, terdapat tiga definisi *cybercrime*, yaitu kejahatan terhadap komputer seperti *hacking*, kejahatan dengan komputer seperti penipuan secara daring menggunakan komputer, dan kejahatan di komputer seperti kejahatan yang mengandung materi seksual (UNODC, 2019). Salah satu contoh kasus *cybercrime* yang sesuai dengan definisi kejahatan di komputer adalah kasus *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC).

Online Sexual Exploitation of Children (OSEC) merupakan kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang praktiknya dilakukan di dunia maya melalui produksi foto, video, hingga *live streaming* yang dijual secara *online* (IJM, 2020). Kasus OSEC dapat ditemukan di negara seperti Filipina. Filipina merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah industri seks komersial yang diberikan julukan sebagai negara pusat eksploitasi seksual (Terre des Hommes Netherlands, 2013). Fenomena eksploitasi seksual yang terjadi di Filipina kian berkembang seiring perkembangan teknologi yang memanfaatkan teknologi sebagai alat eksploitasi (Terre des Hommes Netherlands, 2013). Kasus OSEC menjadi contoh fenomena eksploitasi seksual terhadap anak yang memanfaatkan teknologi dalam praktiknya.

Kasus OSEC pertama teridentifikasi pada tahun 2005 dengan jumlah 5 kasus eksploitasi seksual *online* yang melibatkan 2 orang WNA dan 3 orang warga negara Filipina (World vision development foundation). Setelah tahun

tersebut, pemerintah Filipina tidak dapat mengidentifikasi lebih banyak kasus yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparat hukum Filipina dalam mengidentifikasi lebih banyak kasus. Hal ini menyebabkan pemerintah Filipina menjalin kerjasama dengan sebuah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yaitu *International Justice Missions* (IJM) yang bergerak di bidang hukum dan kemanusiaan yang bekerjasama dengan pemerintahan suatu negara untuk menghentikan kekerasan terhadap manusia yang hidup dalam kemiskinan (IJM, 2020).

Sebelumnya, upaya penanganan eksploitasi seksual terhadap anak sudah pernah dilakukan oleh beberapa NGO lokal. Upaya yang dilakukan berupa penyediaan fasilitas *shelter* dan bimbingan konseling yang diberikan oleh Lembaga *Voice of the Free* (Freedom for All, 2021), dan dilakukannya kampanye bernama *CyberSafePH* terkait bahaya OSEC dan *cyberbullying* (Department of State, 2020) Namun, keterlibatan NGO ini dilihat belum efektif dalam membantu penanganan kasus OSEC, sehingga pemerintah Filipina menjalin kerjasama dengan IJM untuk membantu mengidentifikasi, menginvestigasi, serta menangani kasus OSEC di negaranya.

Pemerintah Filipina menjalin kerjasama dengan IJM untuk membantu mengidentifikasi lebih banyak kasus OSEC serta untuk membantu pemerintah Filipina dalam menangani kasus OSEC melalui implementasi peran yang dimiliki IJM. Sebelumnya, pemerintah Filipina telah bekerjasama dengan IJM di tahun 2000 dalam kasus *human trafficking* di negaranya, kemudian di tahun 2010, pemerintah kembali menjalin kerjasama dengan IJM untuk menangani kasus OSEC. IJM dalam keterlibatannya di Filipina, memiliki empat peran yang diimplementasikan dalam penanganan kasus OSEC, yaitu *rescuing victims* dengan membantu aparat hukum Filipina dalam mengidentifikasi dan melindungi korban OSEC, *bring criminals to justice* dengan membantu polisi Filipina menginvestigasi dan mengumpulkan bukti tentang praktik OSEC, *restoring survival* yaitu memberikan penanganan individual untuk korban melalui konseling

hingga membantu mendapatkan pendidikan, dan *strengthening justice system* dengan memberikan pelatihan kepada aparat hukum Filipina dalam menangani kasus OSEC dan memberikan bantuan hukum untuk korban (IJM, 2019).

Peran ini dilakukan oleh IJM dari tahun 2010 sampai tahun 2019 untuk membantu pemerintah, penegak hukum, dan komunitas Filipina dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus OSEC. IJM juga bekerjasama dengan lembaga pengawas aktifitas internet di Filipina yaitu *National Center for Missing Exploited Children* (NCMEC) untuk menemukan data terkait OSEC di internet dengan melacak alamat IP yang dicurigai terlibat dalam kasus OSEC, baik sebagai pelanggan OSEC maupun sebagai pelaku atau fasilitator OSEC. Pelacakan alamat IP yang dilakukan berhasil menemukan sebanyak 193,405 alamat IP di wilayah Filipina yang 70% diantaranya dicurigai melakukan aktifitas illegal di internet yang berkaitan dengan praktik OSEC maupun praktik *child pornography* lainnya (IJM,2020).

Kerjasama yang dilakukan oleh IJM dan pemerintah Filipina, berhasil membantu pemerintah dan aparat hukum Filipina dalam mengidentifikasi sebanyak 171 kasus OSEC yang melibatkan 571 korban, 229 terdakwa pelaku, dan 76 vonis terhadap pelaku. Selain itu, kerjasama ini membantu Filipina mendapatkan peringkat 1 atau *Tier 1* dari *Trafficking in Persons Report* (TIP) di tahun 2016 yang sebelumnya, Filipina menduduki peringkat atau *Tier 2*. *Trafficking in Persons Report* (TIP) merupakan sebuah laporan yang disusun oleh *Department of State* Amerika Serikat yang berisi laporan perkembangan dan penanganan kasus *human trafficking* di seluruh dunia (Department of State, 2020). Keberhasilan Filipina mendapatkan peringkat 1 disebabkan oleh penanganan kasus *human trafficking* di negaranya sudah dilakukan dengan maksimal, sehingga peringkat yang didapat sesuai dengan upaya yang dilakukan dan telah menunjukkan keberhasilan.

Penelitian ini menggunakan tiga literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama memiliki judul Kerjasama

Interpol-Britania Raya dalam Memerangi Kejahatan Siber: Studi Kasus Peningkatan *Online Child Sexual Abuse* di Britania Raya karya Adinda Indah Karina tahun 2017. Literatur ini menjelaskan tentang kasus *Online Child Sexual Abuse* (OCSA) di Britania Raya yang diklasifikasikan sebagai sebuah kasus *cybercrime* jenis *cyber harassment* yang praktiknya menyalahgunakan teknologi untuk menyebarkan konten seksual dari korbannya yang merupakan anak berusia 6-18 tahun. Terjadinya OCSA di Britania Raya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis pelaku yang sebagian besar memiliki kelainan jiwa yaitu pedofilia, lalu faktor ekonomi juga menyebabkan peningkatan kasus OCSA dengan menjual konten kekerasan seksual, dan tingginya penggunaan internet di negara tersebut.

Kasus OCSA yang terjadi di Britania Raya melibatkan peranan Interpol sebagai polisi dunia. Pemerintah Britania Raya bekerjasama dengan Interpol yang juga bekerjasama dengan *Internet Watch Foundation* dengan tujuan untuk meningkatkan upaya dalam mengidentifikasi korban dan memastikan korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Kerjasama yang dilakukan berhasil menemukan sebanyak 62.000 kasus OCSA yang terjadi di Britania Raya. Adanya bantuan Interpol di Britania Raya membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi kasus OCSA menggunakan *International Child Sexual Exploitation* (ICSE) *database*. *Database* ini juga digunakan oleh Interpol sebagai upaya untuk menghapus konten illegal dan memblokir *website* yang memiliki konten kekerasan seksual terhadap anak. Literatur ini menggambarkan terjadinya fenomena OCSA disebabkan oleh berbagai faktor selain kemiskinan. Selain itu, literatur ini juga menggambarkan bahwa suatu negara membutuhkan aktor lain seperti organisasi internasional untuk mengambil peran di negaranya dalam membantu menangani sebuah kasus.

Literatur kedua berjudul Upaya *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani Prostitusi Terhadap Anak di Filipina tahun 2008-2011 karya dari Rika Mustika tahun

2012. Literatur ini membahas tentang fenomena prostitusi anak dan perempuan di Filipina yang telah terjadi sejak tahun 2000 yang dijadikan sebagai tujuan pariwisata dan mendorong ekonomi negara. Terjadinya fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kemiskinan di Filipina. Krisis ekonomi yang terjadi di Filipina memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyak pihak akan melakukan pekerjaan apapun untuk melakukan penghasilan, tidak terkecuali melakukan prostitusi. Faktor kedua adalah kurangnya pendidikan dan informasi terkait bahaya prostitusi. Sebagian besar masyarakat Filipina kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak, sehingga sulit mengakses informasi mengenai bahaya prostitusi. Lalu, faktor terakhir karena kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak yang disebabkan oleh ketidakpedulian orang tua terhadap masa depan anaknya yang mana orang tua enggan untuk membuatkan akta kelahiran anaknya, sehingga hubungan antara anak dan orang tua tidak terdokumentasi oleh negara yang memudahkan proses prostitusi terhadap anak.

UNICEF kemudian berupaya dalam membantu mengurangi angka prostitusi anak di Filipina, yaitu dengan mengurangi kemiskinan, memberikan perhatian atau pengawasan terhadap anak dibawah umur, memberi pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya prostitusi, dan mengajak anak yang terlibat prostitusi untuk mengintrospeksi diri. Literatur ini membantu menggambarkan faktor penyebab fenomena ini terjadi dan bagaimana keterlibatan aktor selain negara dalam penanganan fenomena ini.

Literatur terakhir yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tulisan karya Eka Mulyani Lestari, I Made Anom Wiranata, dan Putu Titah Kawitri Resen dengan judul *Peran End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT)* dalam menangani CSEC di Thailand pada tahun 2014. Literatur ini mendeskripsikan peran dan strategi ECPAT yang digunakan dalam membantu pemerintah Thailand untuk mencegah dan

menghilangkan fenomena CSEC di Thailand. Literatur ini menggunakan konsep *Civil Society Organizations (CSOs)* dan *Strategy of NGO* dari Carolline Boussard untuk melihat bagaimana peran dan strategi yang digunakan ECPAT sebagai NGO dalam menangani fenomena CSEC di Thailand. Literatur ini menggambarkan peran dan strategi ECPAT sebagai NGO di Thailand sebagai *educator* dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat Thailand untuk ikut serta dalam mencegah dan menyelesaikan masalah CSEC di negaranya, sebagai *counterparts* dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Thailand dalam menangani fenomena CSEC, dan sebagai *agenda setter* dengan membantu memunculkan kesadaran masyarakat bahwa fenomena CSEC merupakan sebuah masalah yang harus ditangani.

Peran ECPAT dalam kasus CSEC di Thailand melalui perannya, tidak semata-mata mengambil alih kebijakan pemerintah melainkan hanya bekerjasama dengan memberikan usulan dan *monitoring* sebagai bentuk bantuan untuk pemerintah Thailand dalam menangani kasus CSEC. Literatur ini membantu menggambarkan bahwa, keterlibatan aktor lain dalam penanganan sebuah isu dapat membantu mengurangi kasus yang terjadi di sebuah negara dan adanya keterlibatan aktor lain juga tidak akan mempengaruhi negara sebagai pengambil keputusan utama. Literatur ini juga membantu melihat peran NGO menggunakan konsep CSOs dalam menangani suatu masalah yang terjadi di sebuah negara dengan menyesuaikan bantuan yang diperlukan oleh negara tersebut.

Ketiga literatur ini membantu penelitian melihat adanya peran aktor lain dalam membantu negara menangani sebuah isu, selain itu ketiga literatur ini membantu penelitian dalam melihat adanya upaya yang dilakukan oleh negara dan aktor yang terlibat dalam menangani isu yang terjadi melalui kerjasama dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Namun, dari ketiga literatur ini belum ditemukan adanya keberhasilan dari kerjasama yang dilakukan oleh aktor yang dibahas. Selain itu, tiga literatur ini juga tidak menunjukkan upaya pencegahan yang

dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam menghadapi kasus serupa, sehingga tidak ditemukan hasil yang ditandai dengan penurunan maupun peningkatan kasus yang dibahas dalam tiga literatur tersebut.

Keterlibatan IJM sebagai INGO dalam menangani kasus OSEC di Filipina membantu pemerintah dan aparat hukum Filipina menangani kasus OSEC dengan dibantu proses identifikasi, investigasi hingga menyediakan fasilitas pemulihan untuk korban OSEC yang berhasil diselamatkan. Adanya peran IJM dalam kasus ini, berhasil membantu pemerintah dan aparat hukum Filipina dalam mengendalikan kasus OSEC yang terjadi di negara tersebut melalui peran IJM sebagai CSOs yang bekerjasama dengan pemerintah negaranya. Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu konsep *Cybercrime* untuk menjelaskan kategori kasus OSEC sebagai kejahatan yang memanfaatkan computer dan jaringan, dan konsep *Civil Society Organizations* (CSOs) untuk menjelaskan peran dan upaya yang dilakukan oleh IJM dalam membantu menangani kasus OSEC yang terjadi di Filipina.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah dan laporan lembaga, dengan data penunjang yang diperoleh dari media massa (berita) serta situs resmi yang diperoleh secara *online*. Penelitian ini menggunakan unit analisis organisasi internasional dalam penelitian ini adalah *International Justice Missions* (IJM), yang digunakan sebagai kunci pengembangan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep *Civil Society Organizations* (CSOs).

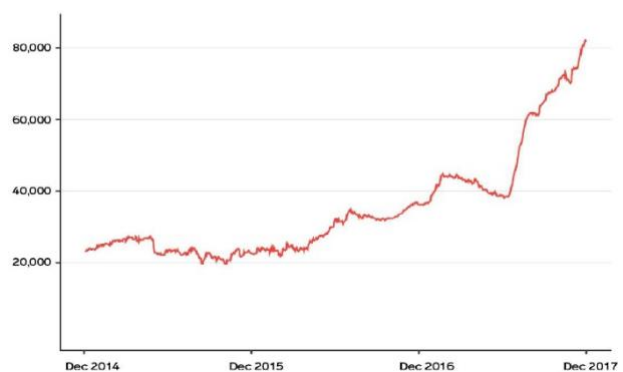
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kasus OSEC di Filipina

Praktik prostitusi terhadap anak di Filipina bukanlah hal yang baru terjadi. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak menjadi sasaran prostitusi anak di negara tersebut. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses terhadap prostitusi anak menjadi

penyebab munculnya fenomena *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC) di Filipina. *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC) merupakan sebuah fenomena prostitusi anak yang dilakukan secara *online* memanfaatkan teknologi dan jaringan. OSEC juga didefinisikan sebagai segala tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak yang memiliki akses internet (Luxembourg, 2016). Jenis tindakan eksploitasi yang termasuk sebagai tindakan OSEC meliputi, eksploitasi seksual yang dilakukan ketika korban sedang *online* dengan mengancam dan memanipulasi korban untuk melakukan aksi seksual secara *live*, tindakan *child grooming* terhadap korban agar korban mau melakukan aksi seksual secara *offline* atau *online*, dan kegiatan distribusi seperti menawarkan, mengimpor, mengekspor, dan menjual konten prostitusi anak, hingga memiliki akses terhadap praktik prostitusi anak juga dianggap sebagai tindakan OSEC (Luxembourg, 2016)

Praktik OSEC biasanya dapat diakses melalui situs *online* seperti situs *webcam* dewasa yang digunakan oleh fasilitator OSEC sebagai tempat berkomunikasi dan bertransaksi dengan pelanggan OSEC. Fasilitator OSEC tidak jarang merupakan kerabat dekat korban seperti orang tua korban. Kasus OSEC pertama ditemukan pada tahun 2005 di wilayah Borraracay dan yang kedua di tahun 2008 di wilayah Bacoor. Kedua kasus awal ini melibatkan lima orang pelaku, yaitu dua orang warga negara Swedia dan tiga orang warga negara Filipina.



Grafik 1. Estimasi Jumlah Alamat IP yang Digunakan untuk Mengakses Konten OSEC dalam Periode 2014-2017.

Berdasarkan laporan dari NCMEC *Cybertipline* yang berbasis di Filipina, ditemukan sebanyak 125.032 laporan yang memenuhi kriteria terkait aktifitas *Child Sexual Exploitation* (CSE) di Filipina. Dari laporan tersebut, NCMEC mengidentifikasi sebanyak 193,405 alamat IP yang digunakan untuk mengakses konten CSE dari tahun 2010-2017. Berdasarkan data tersebut, IJM melakukan estimasi peningkatan jumlah alamat IP dari tahun 2014 sampai 2017. Pada periode ini, IJM menemukan peningkatan jumlah alamat IP yang melakukan aktifitas OSEC meningkat sebanyak tiga kali lipat. Pada periode ini, IJM mengestimasi sebanyak 23.333 alamat IP yang mengakses konten OSEC di tahun 2014-2015, kemudian meningkat drastis pada tahun 2016-2017 mencapai 81,723 alamat IP. Estimasi ini dilakukan oleh IJM pada periode tersebut dikarenakan oleh, pada periode tersebut, terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah alamat IP yang mengakses konten OSEC dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Faktor Tingginya Kasus OSEC di Filipina.

Peningkatan kasus yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi satu dengan faktor lainnya. Faktor tersebut meliputi: (1) adanya sejarah industri seks komersial di Filipina sehingga disebut sebagai negara sumber perdagangan seksual serta menjadi negara tujuan bagi wisatawan yang ingin melakukan pariwisata seksual, (2) infrastruktur pengiriman uang yang memudahkan transaksi OSEC, (3) akses internet yang terjangkau dan mudah hanya dengan memanfaatkan perangkat yang dilengkapi dengan fitur webcam, (4) dan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Filipina yang fasih sehingga memudahkan komunikasi. Masyarakat Filipina juga memiliki pemikiran, apabila seorang anak tidak disentuh secara fisik atau secara langsung, maka tindakan OSEC tidak dianggap sebagai pelecehan seksual karena aktifitasnya yang dilakukan secara online (AMLC Philippines, 2020).

Selain faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus, lembaga *Child Rights Network Philippines* yang juga bekerjasama dengan UNICEF, menyebutkan terdapat faktor

lain yang menjadikan anak-anak di Filipina sebagai sasaran predator seksual. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) tingginya angka kemiskinan yang membuat orang tua mengorbankan anaknya sebagai alat prostitusi, (2) akses internet dan harga ponsel yang terjangkau, (3) kemampuan berbahasa Inggris yang baik membuat komunikasi antara korban prostitusi dengan predator lebih mudah, (4) OSEC dianggap sebagai sumber mata pencaharian bagi keluarga, (5) kurangnya laporan dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang membuat kasus OSEC semakin banyak, (6) kurangnya pengawasan dari orang tua, (7) keterbatasan data OSEC yang juga disebabkan oleh kemampuan aparat hukum yang rendah dalam menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus OSEC sehingga fasilitas untuk membantu korban masih belum memadai (Child Rights Network Ph, n.d.).

Adanya '*culture of silence*' atau 'budaya tutup mulut' di Filipina juga menjadi penyebab OSEC masih terjadi dan dengan mudah dilakukan. Budaya tutup mulut dilakukan dengan tidak melapor terkait praktik OSEC, sehingga pelaku OSEC baik itu sebagai fasilitator OSEC maupun predator seksual sebagai pelanggan OSEC, sulit untuk diidentifikasi dan tidak diproses secara hukum. Namun, budaya ini berdampak pada korban OSEC, karena membuat korban takut untuk melaporkan tindakan OSEC yang dialami (AMLC Philippines, 2020). Faktor-faktor tersebut juga didukung oleh rendahnya kapasitas pemerintah dalam menangani kasus OSEC.

Pemerintah Filipina memerlukan teknologi yang lebih canggih untuk mengidentifikasi korban, mengumpulkan bukti, serta untuk menginvestigasi kasus OSEC dan merespon laporan terkait praktik OSEC secara lebih efektif. Selain itu, sarana pelayanan pemulihan untuk korban juga kurang memadai. Selain hambatan dalam segi teknologi yang dikalahkan oleh teknologi yang digunakan dalam praktik OSEC, penanganan kasus *sex trafficking* di negaranya juga jauh dari kata efisien. Menurut artikel yang berjudul "*Philippines Keeps Tier 1 Status but Convictions of*

Alleged Traffickers Lacking” yang dipublikasikan oleh situs Philstar.com (Patag, 2018), mengatakan bahwa peran kepolisian Filipina dianggap belum cukup dalam menginvestigasi dan menindaklanjuti pelanggaran OSEC yang berkewarganegaraan luar negeri terutama pada kawasan pariwisata, dan kurangnya peran kepolisian dalam menginvestigasi kasus OSEC juga disebabkan oleh keterbatasan pelatihan dari pemerintah Filipina, sehingga kerjasama dilakukan dengan IJM.

Kronologi Keterlibatan IJM di Filipina.

International Justice Missions (IJM) merupakan organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat yang bergerak di bidang kemanusiaan. *International Justice Missions* (IJM) bekerja untuk melindungi manusia yang hidup dalam kemiskinan dari kekerasan. IJM akan bekerjasama dengan pemerintah suatu negara untuk menyelamatkan dan melindungi korban kekerasan dengan menyediakan tempat perlindungan serta bantuan pendidikan hingga ikut membantu aparat hukum negara tersebut dalam memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan (IJM, 2016). IJM pertama kali bekerja dengan pemerintah Filipina pada tahun 2000. Pada tahun tersebut, pemerintah Filipina menjalin kerjasama dengan IJM untuk menangani kasus *sex trafficking* yang terjadi di negaranya, kemudian pemerintah Filipina kembali bekerjasama dengan IJM pada tahun 2010 untuk menangani kasus kekerasan seksual baru yaitu Online Sexual Exploitation of Children (OSEC). Alasan pemerintah Filipina kembali bekerjasama dengan IJM di tahun 2010 yaitu, pada tahun tersebut mulai ditemukan kembali kasus OSEC yang sebelumnya tidak ditemukan. Sehingga, pada tahun 2010 kerjasama tersebut dilakukan kembali sebagai salah satu upaya pemerintah Filipina dalam penanganan kasus OSEC (IJM, 2020).

Pada tahun 2010, IJM mencatat adanya peningkatan jumlah kasus teridentifikasi sebanyak tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. IJM melaporkan jumlah peningkatan kasus yang terjadi dengan melihat jumlah kasus yang berhasil diidentifikasi, jumlah korban yang diselamatkan, dan jumlah pelaku atau fasilitator

yang di tangkap. Keterlibatan IJM dalam kasus OSEC di Filipina sangat membantu pemerintah Filipina terutama aparat hukum negara tersebut dalam upaya penanganan kasus ini. IJM sebagai INGO dalam membantu suatu negara, memiliki beberapa Peran yang akan digunakan untuk menangani sebuah kasus. Terdapat empat Peran IJM yang digunakan dalam menangani kasus OSEC di Filipina, yaitu: *rescuing victims, bring criminals to justice, restoring survivals, strengthening justice system.*

Keempat peran ini diimplementasikan oleh IJM kedalam tiga program yang dijalankan di tiga wilayah di Filipina yaitu Cebu, Manila, dan Pampanga. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah dengan angka OSEC tertinggi dan merupakan pusat eksploitasi seksual di Filipina. IJM membentuk tiga program untuk masing-masing wilayah, yaitu *Project Lantern* di Cebu, *Anti-Sex Trafficking System Transformation Project* di Manila, dan *Pampanga Project* di Kota Pampanga. Dalam program ini, IJM menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari *Philippines National Police Regional Anti-Human Trafficking Special Operation Group* (PNP RAHTSOG) (Haarr, 2017).

International Justice Missions (IJM)

International Justice Missions (IJM) merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah (INGO) yang berbasis di Amerika Serikat yang bergerak di bidang hukum dan kemanusiaan. IJM dibentuk dengan tujuan memberikan bantuan hukum dan kemanusiaan kepada masyarakat miskin, serta membantu memperbaiki sistem hukum suatu negara (Powers, 2009). IJM bekerjasama dengan negara dalam menangani kasus hukum dan kemanusiaan seperti *sex trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak, perbudakan, sengketa properti, penyalahgunaan kekuasaan, hingga membantu minoritas

IJM dalam perannya menangani kasus kekerasan, merancang program yang akan dijalankan di negara tersebut yang disesuaikan dengan bantuan yang dibutuhkan dalam menangani kasus, mulai dari meningkatkan kapasitas pemerintah dan aparat hukum, hingga fasilitas yang akan diberikan kepada korban kekerasan. Suatu negara untuk mendapatkan

haknya (Enos & Roberts, 2016). *International Justice Missions* (IJM) berkolaborasi dengan aparat hukum lokal dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual seperti *sex trafficking*, perbudakan, dan penyerangan seksual yang terjadi di negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Burkhalter, 2017).

IJM telah bekerjasama dengan 14 negara di dunia dalam menangani kasus kemanusiaan dan membantu mereka untuk mendapat keadilan. Fokus utama IJM adalah membantu negara dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui empat peran yang dilakukan oleh IJM, keempat peran tersebut yaitu, *rescuing victims*, *bring criminals to justice*, *restoring survival*, dan *strengthening justice system*. Keempat peran ini berfokus dalam meningkatkan kapasitas pemerintah suatu negara dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan pelaku kekerasan. Filipina menjadi salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan IJM dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang bernama *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC) yang terus meningkat di negaranya dari tahun 2010-2019.

Dalam keterlibatannya di Filipina, IJM berperan sebagai CSOs dalam membantu pemerintah Filipina menangani kasus OSEC dengan menjadi *educator*, *counterpart* dan *agenda setter*. IJM telah berperan sebagai CSOs di Filipina melalui perannya sebagai *educator* dengan memberi edukasi berupa informasi terkait bahaya OSEC kepada masyarakat Filipina. Kemudian, IJM sebagai CSOs menjadi *counterpart* dari pemerintah Filipina dengan berkoalisi meningkatkan kapasitas aparat hukum negaranya. Dalam perannya sebagai CSOs, IJM menjadikan fenomena OSEC sebagai sebuah agenda yang harus segera ditangani oleh pemerintah Filipina melalui perannya sebagai *agenda setter*. Ketiga peran IJM sebagai CSOs ini dilakukan oleh IJM sebagai bentuk upaya penanganan kasus OSEC di Filipina yang terus meningkat dari tahun 2010-2019.

Online Sexual Exploitation of Children (OSEC) di Filipina sebagai Cybercrime

OSEC termasuk sebagai bagian dari fenomena eksploitasi seksual yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat kejahatan. Menurut pedoman berjudul *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse* dari *Interagency Working Group in Luxembourg*, OSEC merupakan segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang menggunakan internet dan teknologi dalam mendokumentasikan, memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan memiliki material eksploitasi seksual (Luxembourg, 2016). Terdapat karakteristik kejahatan OSEC berdasarkan pedoman tersebut, yaitu eksploitasi seksual yang dilakukan ketika korban sedang terhubung dengan koneksi internet (*Online*), melakukan *child grooming* terhadap calon korban eksploitasi dengan mendapatkan kepercayaan mereka dengan tujuan mengeskplotasi mereka secara *online* atau *offline*, dan tindakan distribusi, penyebaran, impor, eskpor, menawarkan, menjual, adanya kepemilikan atau tindakan mengakses konten eksploitasi seksual terhadap anak secara *online* (Luxembourg, 2016).

Menurut UNODC, *cybercrime* memiliki tiga definisi, definisi pertama dilihat dari perspektif sains, definisi kedua dilihat dari perspektif legal dan kriminologi, dan perseptkf ketiga adalah perspektif politik. Berdasarkan definisi dari UNODC tersebut, OSEC sesuai dengan definisi *cybercrime* menurut perspektif legal dan kriminologi karena alat teknologi informasi dimanfaatkan sebagai alat kejahatan. Definisi *cybercrime* menurut perspektif legal dan kriminologi menunjukkan OSEC menjadi salah satu contoh kejahatan siber yang menggunakan komputer dalam memproduksi, menjual, hingga menyimpan materi eskplotasi seksual. Menurut Robert Moore dalam bukunya yang berjudul *Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime* (2015), definisi *cybercrime* merujuk kepada segala kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan baik komputer digunakan sebagai instrument kejahatan atau tidak. Moore (2015) dalam bukunya menjabarkan terdapat tiga kategori kejahatan yang melibatkan komputer dan

jaringan, yaitu: *the computer as an instrument of the crime, the computer as the focus of a crime, dan the computer as a repository of evidence* (Moore, 2015).

Berdasarkan ketiga kategori diatas, penulis mengkategorikan OSEC sebagai jenis kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai instrument, dan sebagai tempat penyimpanan bukti kejahatan. OSEC memerlukan komputer dan jaringan untuk melakukan aksinya yaitu memproduksi konten OSEC seperti melakukan *live streaming* eksploitasi seksual terhadap anak. Setelah memproduksi, pelaku OSEC menggunakan komputer untuk menyimpan bukti dilakukannya aktifitas eksploitasi yang berupa konten OSEC seperti foto, video, hingga audio yang diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan OSEC.

Analisis Peran IJM sebagai Civil Society Organizations (CSOs)

Peran IJM di Filipina dalam membantu penanganan OSEC di negara tersebut didasari oleh empat misi IJM yaitu: *Rescuing Victims*, dalam peran pertama ini, IJM melakukan beberapa upaya dalam menyelamatkan serta melindungi korban OSEC yang merupakan anak-anak, *Bring Criminals to Justice*, pada peran ini IJM berupaya untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti pelaku OSEC baik sebagai fasilitator maupun sebagai pelanggan, *Restoring Survivals*, pada peran ini IJM berupaya dengan menyediakan tempat berlindung bagi korban OSEC, dan *Strengthening Justice Systems*, pada peran terakhir IJM melakukan kolaborasi dengan pemerintah Filipina terutama dengan aparat hukum Filipina dengan membantu meningkatkan kapasitas aparat hukum Filipina melalui pelatihan untuk menangani kasus OSEC atau *human trafficking* lainnya.

IJM dalam penelitian ini berperan sebagai *Civil Society Organization (CSOs)*. *Civil Society Organizations (CSOs)* menurut Caroline Boussard dalam bukunya yang berjudul "*Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras*", mendefinisikan *Civil Society* sebagai kolektifitas non-profit sukarela yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau melindungi sebuah subjek yang bukan

bagian dari apapun (Boussard, 2003). IJM sebagai organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan dan hukum termasuk kedalam CSOs karena bersifat non-profit sukarela yang memiliki misi untuk membantu manusia yang hidup dalam kemiskinan dari segala bentuk kekerasan (Boussard, 2003). Dalam melakukan keempat peran tersebut, IJM sebagai bagian dari CSOs berperan sebagai *educator, counterpart, dan agenda setter* melalui tiga program yang dijalankan oleh IJM yang dilakukan di tiga wilayah di Filipina, yaitu Kota Cebu dengan *Project Lantern*, Manila dengan program *Anti-Sex Trafficking System Transformation Project*, dan Pampanga dengan *Pampanga Project*.

IJM sebagai Educator

IJM sebagai *educator* dalam kasus OSEC di Filipina, berperan dalam memberikan edukasi berupa informasi tentang OSEC, memberikan bimbingan konseling dan perlindungan kepada korban OSEC, dan memberikan edukasi informal kepada masyarakat Filipina terkait bahaya OSEC terhadap kesehatan anak-anak. IJM sebagai *educator*, akan mengedukasi tidak hanya kepada korban dan masyarakat, tetapi juga kepada aparat hukum serta lembaga kemanusiaan Filipina tentang proses menyelamatkan dan melindungi korban OSEC dari kasus serupa. Peran IJM sebagai *educator* dilakukan melalui tiga program di tiga wilayah Filipina sebagai bagian dari *restoring survival, rescuing victims, dan strengthening justice systems* dalam menyelamatkan korban dari praktik OSEC, memberi bantuan konseling dan tempat perlindungan dengan fasilitas yang cukup dalam membantu korban OSEC menghadapi trauma yang dialami sebagai korban, serta memperkuat sistem keadilan di Filipina melalui pelatihan yang diberikan kepada aparat hukum. IJM sebagai *educator* juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada lembaga kemanusiaan Filipina atau yang disebut dengan *Department of Social Welfare and Development (DSWD)* dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas untuk membantu pemulihan korban.

IJM berperan sebagai *educator* di tiga wilayah di Filipina melalui tiga program yang diciptakan untuk masing-masing wilayah. Dalam *Project Lantern*, IJM memberikan edukasi

melalui pelatihan tentang pemberian pelayanan dan fasilitas kepada DSWD Kota Cebu dalam membimbing korban mengatasi trauma yang dialami akibat OSEC. Salah satu contoh fasilitas yang diberikan dalam *Project Lantern* ini adalah diciptakannya fasilitas yang disebut dengan ‘*Her Space*’ yang merupakan layanan konseling bagi korban OSEC terutama anak perempuan dalam mendapatkan bimbingan konseling tanpa diskriminasi dan intimidasi (Haarr, 2017), sehingga korban OSEC dapat secara nyaman mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dalam *Anti-Sex Trafficking System Transformation* yang dijalankan di Kota Manila, Filipina. Melalui program ini IJM juga berperan sebagai *educator* dengan menciptakan sebuah layanan konseling yang terinspirasi dari program sebelumnya, yaitu fasilitas ‘*Safe Space*’ yang dibuat untuk korban OSEC. Fasilitas “*Safe Space*” dibentuk oleh IJM untuk memfasilitasi korban OSEC dengan bimbingan konseling yang tidak menunjukkan bias gender dan berfokus pada korban (Haarr, 2017). Dalam program ini, IJM lebih memfokuskan upayanya dalam meningkatkan fasilitas dan layanan untuk pemulihan korban. Peran IJM sebagai *educator* selanjutnya dilakukan di Kota Pampanga, Filipina melalui program *Pampanga Project*. Sebagai *educator*, IJM menciptakan *Survivor Support Network* (SSN) di Pampanga sebagai fasilitas pemulihan korban yang menyediakan konseling trauma psikis, dan memberi pelatihan untuk mengasah kemampuan korban melalui pelatihan skill, dan juga diberikan fasilitas kesehatan.

IJM sebagai Counterpart

IJM dalam kasus OSEC di Filipina, berperan sebagai *counterpart* atau rekanan pemerintah dengan berkoalisi dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan Filipina dalam meningkatkan kapasitas aparat hukum dan lembaga keadilan Filipina dalam menindaklanjuti kasus OSEC yang teridentifikasi. Upaya ini dilakukan sejalan dengan peran IJM yaitu *bring criminals to justice* yang dilakukan dengan membantu proses penangkapan pelaku dan persidangan pelaku. Upaya ini dilakukan secara kooperatif antara IJM dan aparat hukum lokal untuk membantu

korban mendapatkan keadilan, yaitu dengan memberikan hukuman.

Peran IJM sebagai *counterpart* terlihat dalam upayanya mendukung lembaga hukum lokal wilayah Cebu, Filipina dengan mendukung lembaga hukum Filipina bernama *Department of Justice* (DOJ) dalam proses pengadilan pelaku OSEC. IJM berperan secara kooperatif bersama lembaga hukum Filipina. Peran kooperatif IJM dengan DOJ Filipina terlihat dari upaya IJM dalam merancang pedoman yang berisi 18 topik terkait human trafficking (IJM Cebu, 2010). Peran IJM sebagai *counterpart* tidak hanya dalam peningkatan kapasitas pengadilan dalam menindaklanjuti pelaku tetapi juga berkoordinasi dengan DSWD kota Cebu dalam memastikan keadaan korban yang diselamatkan dan diberikan fasilitas pemulihan apakah kembali mengalami eksploitasi atau tidak. IJM juga berperan sebagai *counterpart* di Manila dalam program *Anti-Sex Trafficking System Transformation* dengan berkooperasi bersama NGO lokal bernama ‘*Marilla Hills (Marillac)*’ dan ‘*Haven for Woman*’ dalam menciptakan fasilitas perlindungan yang mendukung pemulihan korban melalui konseling pasca trauma dan evaluasi keadaan korban OSEC (Haarr, 2017). IJM juga berkontribusi dengan lembaga *Reintegration Support Networks* (RSNs) milik negara, dengan menyalurkan SDM berpengalaman untuk membantu fasilitas pemulihan korban, menjalankan protokol rehabilitasi korban dalam memberi konseling psikis, hingga pelatihan skill kepada korban. Dalam *Pampanga Project*, IJM berkolaborasi dengan pemerintah kota Pampanga dalam meningkatkan sistem keadilan publik Pampanga untuk mencapai penurunan angka prevalensi OSEC secara signifikan. Melalui program ini, IJM berkolaborasi dengan *Department of Justice* (DOJ) Filipina, *Department of Labor and Employment* (DOLE) Filipina, dan *Department of Social Welfare and Development* (DSWD) Filipina dalam menjaga komitmen pemerintah dalam menjalankan protokol terkait penanganan OSEC.

IJM sebagai Agenda setter

'#DontJUSTSendFlowers'. Kampanye ini dilakukan oleh IJM dengan bekerjasama dengan beberapa influencer atau figur publik Filipina untuk menarik perhatian dengan tujuan menumbuhkan kesadaran publik bahwa negara Filipina tidak bisa lagi membiarkan anak-anak di negaranya mengalami eksploitasi seksual (Yahoo News, 2020).

IJM berperan sebagai CSOSs dalam kasus ini yang dilakukan dari tahun 2010 sampai dengan 2019, berhasil membantu pemerintah Filipina dalam mengidentifikasi 171 kasus OSEC yang melibatkan sebanyak 571 korban yang diselamatkan, 229 pelaku didakwa atas praktik OSEC, dan 79 proses pengadilan dilakukan. Melalui program yang dijalankan, IJM membantu pemerintah Filipina dalam memperbaiki sistem keadilan mereka yang ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku yang ditemukan, jumlah korban yang selamat dan jumlah kasus yang berhasil diidentifikasi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah Filipina hanya berhasil mengungkap sebanyak lima kasus yang melibatkan lima orang pelaku tetapi tidak teridentifikasi jumlah korban yang terlibat. Selain itu, keterlibatan IJM dalam menangani kasus OSEC di Filipina, juga membantu Filipina menduduki peringkat atau *Tier 1* menurut *Trafficking in Persons Report* yang menunjukkan upaya penanganan kasus *human trafficking* yang dilakukan sudah maksimal.

IJM juga bekerjasama dengan *Philippine National Police-Woman and Children Protection Center* (PNP-WCPC) dan *National Bureau of Investigation-Anti Human Trafficking Division* (NBI-AHTRAD), yang berhasil menemukan sebanyak 86% dari jumlah korban yang selamat merupakan perempuan dan 14% merupakan laki-laki. Kerjasama ini juga menunjukkan rata-rata korban OSEC merupakan anak berumur 11 tahun. IJM dan PNP WCPC serta NBI-AHTRAD, juga menemukan bahwa 96% pelaku OSEC merupakan warga negara Filipina yang sebagian besar merupakan kerabat dekat korban (IJM, 2020). Berdasarkan data ini, IJM berhasil membantu Filipina dalam mengurangi kasus OSEC sebanyak 79% dari sebelumnya. Selain keberhasilannya melalui perannya sebagai

IJM sebagai *agenda setter* berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terkait OSEC. Dalam upayanya sebagai *agenda setter*, IJM membuat kampanye yang juga bersasosiasi dengan NGO lokal Filipina. Dalam perannya sebagai *agenda setter*, IJM membangun kesadaran publik dengan tujuan untuk memunculkan opini publik bahwa fenomena OSEC berdampak buruk bagi anak-anak dan masih banyak kasus OSEC yang belum teridentifikasi di Filipina sehingga diperlukan penanganan yang efektif dari pemerintah Filipina. IJM sebagai *agenda setter* juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa fenomena ini dapat berdampak traumatis terhadap korban, sehingga diperlukan pendekatan khusus dari segi bantuan psikis anak-anak yang menjadi korban OSEC sebagai bentuk upaya pemulihan keadaan korban. Peran IJM sebagai *agenda setter* dilakukan melalui *setting agenda* dengan memanfaatkan media atau melakukan kampanye untuk menarik perhatian publik terkait kasus OSEC yang terjadi di Filipina dan menjadikan fenomena OSEC sebagai kasus yang perlu diprioritaskan penanganannya.

Program IJM di Cebu yaitu *Project Lantern*, memanfaatkan media dalam mengkampanyekan isu OSEC yang terjadi. Salah satu kampanye yang dilakukan oleh IJM dalam program ini dilakukan bersama komunitas lokal Filipina seperti, dilakukannya gerakan *War Against Trafficking* (WAT) yang diinisiasikan oleh sebuah NGO yaitu *Visayan Forum*, dan diadakannya *Grassroots Community Trainings* (IJM Cebu, 2010). IJM bergerak bersama forum ini dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik terkait *human trafficking*, membagikan informasi dan mengadvokasi program-program anti *trafficking*. Selain gerakan WAT, IJM juga mengadakan seminar terkait hukum dalam perdagangan manusia, situasi *human trafficking*, serta bagaimana dampak dari *human trafficking* yang terjadi melalui *grassroots community trainings* (IJM Cebu, 2010). IJM memberikan pelatihan kepada komunitas ini sebagai bentuk upaya melawan *human trafficking*. Peran sebagai *agenda setter* juga dilakukan di Manila, Filipina melalui sebuah kampanye yang dinamakan

CSOs dalam periode keterlibatannya dalam kasus OSEC di Filipina, IJM mendirikan sebuah kantor cabang di dua kota besar Filipina yaitu kota Cebu, dan kota Manila. Pendirian dua kantor cabang ini bertujuan untuk membantu aparat hukum lokal dalam menyelamatkan dan melindungi anak-anak dari praktik *sex trafficking* seperti OSEC. Melalui kantor cabang ini, IJM dapat membantu melatih aparat hukum Filipina dalam mencegah perkembangan kasus eksploitasi seksual di negara tersebut. Berkat adanya kantor ini, membantu mengurangi angka eksploitasi anak mencapai 79% (IJM, 2019).

PENUTUP

IJM sebagai CSOs membantu Filipina dalam mengendalikan kasus OSEC melalui perannya sebagai *educator*, IJM berupaya dalam memberikan pelatihan kepada aparat hukum dan lembaga keadilan dalam menangani kasus OSEC yang terjadi sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas aparat hukum negaranya. Selain aparat hukum dan lembaga keadilan, IJM juga memberi pelatihan kepada lembaga kemanusiaan Filipina dalam memberikan fasilitas pemulihan kepada korban OSEC. Kemudian IJM sebagai *counterpart* melalui koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah Filipina seperti DSWD, DOJ, DOLE, PNP, NBI dan NCMEC *Cybertipline* dalam melihat aktifitas internet di Filipina. Peran terakhir adalah sebagai *agenda setter* yang mana peran ini dilakukan oleh IJM melalui pembuatan agenda terkait OSEC yang menjadikan OSEC sebagai sebuah prioritas yang membutuhkan penanganan.

Program IJM yang dilakukan di Filipina yang bersifat jangka panjang membantu penanganan serta pencegahan terhadap terjadinya fenomena serupa. Keberhasilan peran IJM dalam kasus ini ditunjukkan dengan meningkatnya kasus yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat hukum dan lembaga keadilan sehingga angka korban yang diselamatkan juga mengalami peningkatan dan mulai mendapatkan fasilitas pemulihan trauma yang disediakan oleh IJM dan DSWD. Tetapi, dibalik keberhasilan tersebut, terdapat sedikit

kegagalan dalam perannya di Filipina. Hal ini merujuk kepada program jangka panjang IJM yang mengalami hambatan dalam praktiknya akibat fenomena Covid-19 yang berdampak pada kembali meningkatnya kasus OSEC yang juga dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat Filipina akibat pembatasan kegiatan atau isolasi yang terjadi akibat Covid-19.

Daftar Pustaka

- Berger, R., & Quinney, R. (2004). *Storytelling sociology: Narrative as social inquiry*. (Lynne Renner (Ed.)). Diakses pada 24 Agustus 2022
- Boussard, C. (2003). *Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras*. Department of Political Science, Lund University. Diakses pada 23 Desember 2022
- Griffin, L. J. (1992). *Temporality, events and explanation in historical sociology*. *Sociological Methods and Research* (E. & M. Borgatta (Eds.)). Macmillan. Diakses pada 23 Desember 2022
- Luxembourg, E. (2016). *FOR THE PROTECTION OF CHILDREN* (S. Greijer & J. Doek (Eds.); 1st ed.). ECPAT International. Diakses pada 23 Desember 2022
- Moore, R. (2015). *Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime* (2nd ed.). Routledge. Diakses pada 22 Desember 2022
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Diakses pada 22 Desember 2022
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education. Diakses pada 19 Desember 2021
- AMLC Philippines. (2020). *Republic of the Philippines AMLC A crime with aglobal impact and an evolving transnational threat A MONEY LAUNDERING / TERRORISM*. http://www.amlc.gov.ph/images/PDFs/AMLC_COVID-19_FINANCIAL_CRIME_TREND_ANALYSIS_AND TYPOLOGIES BRIEF.pdf diakses pada 22 Desember 2022
- Burkhalter, H. (2017). *Child Sexual Assault: Practice and Learnings*. 1–12. Diakses pada 19 Desember 2021
- Child Rights Network Ph. (n.d.). *6 things you need to know about OSEC in the Philippines*. Diakses pada 22 desember 2022
- IJM Cebu. (2010). *International Justice Mission Cebu, the Philippines Project Lantern Results Summary*. Diakses pada 19 Desember 2021
- IJM Thailand. (2015). *The Problem Citizenship Rights Abuses; Sexual Violence Againsts Children*. IJM.Org. Diakses pada 19 Desember 2021

- IJM. (2016). Child Sex Trafficking in Metro Manila. https://ijmstorage.live.blob.core.windows.net/ijmna/documents/studies/ij_manila-final-web-v2.pdf
Diakses pada 19 Desember 2021
- Karina, A. I. (2017). Kerja Sama Interpol – Britania Raya dalam Memerangi Kejahatan Siber: Studi Kasus Peningkatan Online Child Sexual Abuse di Britania Raya. *Journal of International Relations*, 3(4), 167–173. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Diakses pada 19 Desember 2021
- Lestari, E. M., Wiranata, A., & Kawitri, T. (2014). PERAN ECPAT DALAM MENANGANI CSEC OLEH WISATAWAN ASING DI THAILAND. Diakses pada 19 Desember 2021
- McGeough, S., & The Anti-Human Trafficking Intelligence Cell of Mercyhurst University. (2022). *Human Trafficking in The Philippines*. Diakses pada 30 Desember 2022
- Mustika, R. (2012). UPAYA UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)DALAM MENANGANI PROSTITUSI TERHADAP ANAK DI FILIPINA TAHUN 2008-2011. Diakses pada 19 Desember 2021
- Shaw, D., & Frugé, T. (2016). Child Sex Trafficking in Metro Manila Using time space sampling to measure prevalence of child sex trafficking in Metro Manila, the Philippines.
- Terre des Hommes Netherlands. (2013). Research into the nature and extent of webcam child sex tourism in the Philippines.
- UNODC. (2019). Module 1: Introduction to Cybercrime. E4J University Module Series: Cybercrime. <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module1/key-issues/cybercrime-in-brief.html> Diakses pada 19 Desember 2021
- USAID. (2006). INTERNATIONAL JUSTICE MISSION ANTI – TRAFFICKING PROGRAM IN CAMBODIA.
- World Vision Development Foundation. (2020). *Community Perspectives on Online Sexual Exploitation of Children*.
- Department of State. (2020). *Trafficking In Person 20th Edition*. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>
- Enos, O., & Roberts, J. (2016). To Reduce Human Trafficking, fight Corruption and Improve Economic Freedom. <https://www.heritage.org/international-economies/report/reduce-human-trafficking-fight-corruption-and-improve-economic>
- Grajeda, L. D., Romero, M. G., & Delgado, A. (2018). *Final Evaluation of Program to Combat Sexual Violence Againsts Children and Adolescents in Guatemala 2005-2017*.
- Haarr, R. (2017). *Evaluation of the Program to Combat Sex Trafficking of Children in the Philippines: 2003-2015*.
- IJM. (2015). *External Evaluation of International Justice Mission's Program to Combat Sex Trafficking of Children in Cambodia, 2004-2014*. Diakses pada 19 Desember 2021
- IJM. (2019). *2019 IJM Fact Sheet SEAsia Manila, Philippines*. Diakses pada 19 Desember 2021
- IJM. (2020). *Online Sexual Exploitation of Children in The Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry, and Civil Society*. <https://www.ijm.org/studies/full-length-report-online-sexual-exploitation-of-children-in-the-philippines-analysis-and-recommendations-for-governments-industry-and-civil-society> Diakses pada 19 Desember 2021
- Peden, M., & Oyegbite, K. (2008). *World Report on Child Injury Prevention* (J. Ozanne-Smith, A. A. Hyder, C. Branche, A. F. Rahman, F. Rivara, & K. Bartolomeos (eds.)). WHO Library Catalogue. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/mmary_en.pdf
- Twedt, B. C., & Missions, I. J. (2013). *Guatemalan Criminal Justice System Performance Study, 2008-2012 Indicators of Practice, Process and Resolution within cases of Child Sexual Assault*. <https://www.ijm.org/sites/default/files/resources/GuatemalaPublicJusticeSystemPerf%0AormanceStudy.pdf>. Diakses pada 27 juni 2022
- Freedom for All. (2021). *THE PHILIPPINES Voice of the Free*. <https://www.freedomforall.org/voice-of-the-free>
- IJM. (n.d.). *International Justice Mission*. 2021. <https://www.ijm.org/about-ijm> Diakses pada 19 Desember 2021
- Jayani, D. H. (2021). *Daftar Negara dengan Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Terbanyak di Asia Tenggara*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara>
- Patag, K. J. (2018). *Philippines Keeps Tier 1 Status but Covictions of Alleged Traffickers Lacking*. Philstar.Com. Diakses pada 23 agustus 2022
- Powers, S. (2009). *The Enforcer; A Christian Lawyer's Global Crusade*. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/magazine/2009/01/19/the-enforcer>
- Rappler. (2020). *FAST FACTS: Why online sexual exploitation of children happens in the Philippines*. Rappler.

<https://www.rappler.com/newsbreak/iq/251532-things-to-know-online-sexual-exploitation-children-philippines/> diakses pada 13 april 2022

Sunstar. (2019). Authorities rescue 3 minors, arrest trafficker.

<https://www.sunstar.com.ph/ampArticle/1855186>

diakses pada 25 Juli 2022

Tirto.id. (2021). Apa Saja Dampak Positif-Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi?

<https://tirto.id/apa-saja-dampak-positif-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-gaTD>

TogetherforGirls.org. (2018). Criminal Justice Response in Guatemala.

Visayan Forum Foundation Talk. (2014).

<https://jorellemoreno.wordpress.com/> diakses pada 14 Mei 2022

Yahoo News. (2020). IJM Launches Video Campaign vs OSEC with Leading Filipina Influencers. Diakses pada 25 Juli 2022